

KONVERSI LAHAN MENINGKAT

Sultan: Terapkan Sistem Zonasi Lahan Pertanian Berkelanjutan

Jakarta, Khazanah - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan upaya pemetaan kawasan pertanian di daerah dengan sistem zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya ancaman konversi Lahan Pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri di hampir semua daerah saat ini. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektare per tahun.

"Konversi lahan pertanian itu menjadi salah satu ancaman terhadap sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional. Karena sistem pertanian kita belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan mekanisasi pertanian yang efisien dan presisi," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Senin (20/03).

Zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kata Sultan, justru akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penerapan mekanisasi pertanian. Karena setiap komoditi membutuhkan alat dan mesin pertanian yang berbeda-beda.

"Jenis komoditi yang terkonsentrasi dalam suatu



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin dalam sebuah pertemuan

kawasan akan sangat efisien bagi alat dan mesin pertanian secara kolektif. Hal ini tentu akan mempercepat peningkatan level mekanisasi pertanian Indonesia yang ditargetkan hingga 3,5 hp pada 2024. Tahun 2021 lalu indeks mekanisasi kita baru tercatat mencapai 2,1 house power (hp) per hektare (ha)," ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, kami berharap pemerintah daerah untuk aktif mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan pertanian pangan eksisting di daerahnya masing-masing. Dan kemudian melakukan pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sesuai petunjuk teknis dari kementerian pertanian.

"Pemerintah daerah dan desa harus melibatkan masyarakat dalam membangun skenario zonasi guna menemukan zonasi LP2B dan LCP2B dengan berbagai tingkat keterancaman dari alih fungsi dan yang dapat dikelola secara optimal sesuai jenis komoditi unggulan di daerahnya. Dengan demikian sistem zonasi lahan pertanian juga akan berdampak pada spesifikasi komoditas unggulan di setiap daerah," tutupnya. ■ jet/re

Usai Dilantik, JPS Sumbar Diskusi Harga Sembako

Padang, Khazanah - Jaringan Pemred Sumbar (JPS) masa bakti 2022-2025, resmi dilantik dan berikrar yang dipandu langsung Dewan Pembina JPS HM Nurmas di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin (20/3).

"Saya HM Nurmas selaku pembina JPS dengan resmi melantik dan mengambil ikrar pelantikan, semoga ini menjadi awal kerja JPS masa bakti 2022-2025, tetapl berintegritas dan bekerja sesuai kaidah jumulistik," ujar HM Nurmas.

Susunan personalia kepemimpinan JPS tersebut dengan Ketua Adrian Tuswandi, Sekretaris Zondra Volta dan Bendahara Mona Sisca oleh Dewan Penasehat JPS Novrianto.

Adrian pada pidato pertama menjadi Ketua JPS menegaskan bahwa JPS hadir sebagai wadah Pemred dan Owner media se Sumbar yang berfungsi membangun sinergitas dan kolaboratif dengan stake holder se Sumbar untuk pemberitaan yang pro rakyat.

"JPS tidak akan pernah mengintervensi ruang redaksi media, tapi JPS adalah media untuk 'berjangkit' terkait pemberitaan yang akan dibaca oleh publik luas, ajang sharing dan diskusi, ingat diskusi bulanan JPS itu viral, acap kali ketika habis diskusi saham Sumbar bisa jeblok atau naik," ujar Toaik, biasa Adrian Tuswandi disapa banyak kalangan di Sumbar dan juga nasional.

Gubernur Sumbar diwakili Kadis Pangan Effendi mengatakan



Pengurus JPS Sumbar foto bersama Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Kadis Pangan Effendi usai pelantikan

JPS menjadi mitra penting Pemprov Sumbar.

"Saya sudah dua kali hadir di kegiatan JPS ini, terus terang kontribusi JPS bagi pencitraan pemerintah sangat baik, mewakili Pak Gubernur saya mengucapkan selamat atas pelantikan JPS masa bakti 2022-2025 ini," ujar Effendi.

Pelantikan dilanjutkan dengan diskusi dengan tema Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, Stabilitas Harga Bahan Pokok.

Tiga pembicara hebat tampil, Syafrizal mewakili Kadis Perindag Sumbar, Rifdonald mewakili Harnely Bahar dan akdemisi dari Fakultas Ekonomi Bisnis UNAND Fajri Muharja.

"Tidak sama kenaikan harga dengan inflasi, pengendalian harga di Ramadhan dan Idul Fitri peran pemerintah sangat penting. Ingat untuk pertumbuhan ekonomi Ramadhan sangat besar sumbangannya ketimbang akhir

tahun anggaran," ujar Fajri Muharja. Syafrizal dan Rifdonald menegaskan bawa saat ini harga bahan pokok masih stabil kalau pun ada kenaikan masih wajar.

"Tapi jika kenaikan harga sudah sistem maka pemerintah akan masuk, dengan berbagai program menstabilkan harga kembali," ujar dua pejabat di Disperindag Sumbar pada diskusi dengan host Adrian Tuswandi. ■ jet/re

Supardi Hadiri Gathering Sahabat Uzma di Sariak Laweh

Sarilamak, Khazanah - Ketua DPRD Sumbar Supardi berniat merencanakan akses jalan yang layak dan memadai menuju kampung peradaban Al Quran yang diproyeksikan akan menjadi pusat pengkajian dan pengalaman nilai-nilai Alquran dan sedang disiapkan di Nagari Sariak Laweh, Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita harus menyediakan akses jalan yang representatif untuk menuju kampung peradaban Al Quran. Jika tidak, kurang bermakna juga tempat yang sangat strategis ini di masa yang akan datang," kata Supardi saat menghadiri International Gathering Sahabat Uzma di Uzma Center Nagari Sariak Laweh Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (19/3).

Dia mengatakan, sebagai unsur pengantar pemerintah provinsi, pihaknya mendukung pembangunan kampung peradaban Al Quran, dimana negara saat ini tengah dilanda krisis integritas hingga moralitas.

"Nantinya kampung ini akan menjadi peradaban baru dengan basis keislaman yang kuat," tukiknya.

Seperti diketahui, lanjutnya, Ranah Minang memiliki filosofi



Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menghadiri kegiatan International Gathering Sahabat Uzma di Uzma Center Nagari Sariak Laweh Kabupaten Limapuluh Kota, Ming

Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, 70 persen tokoh kemerdekaan Indonesia berasal dari daerah kita.

"Kenyataannya pada saat sekarang tidak ada lagi tokoh seperti M Natsir, Buya Hamka dan sebagainya di Sumbar, dengan adanya kampung Al-Quran bisa melahirkan tokoh-tokoh ulama seperti dahulu," katanya.

Dia berharap, kampung peradaban Al-Quran tidak hanya membahas pengkajian Al Quran saja, namun juga mencari solusi dari persoalan-persoalan

yang dihadapi oleh umat.

Tidak hanya itu, tempat ini diharapkan bisa melahirkan cendekiawan hingga budayawan yang peduli akan pembangunan daerah dengan penerapan nilai-nilai Al-Quran.

Kampung Qur'an merupakan program dakwah Alquran berbasis kawasan, lingkungan, dan komunitas yang berada di wilayah marginal, terpencil, minoritas, bekas terdampak bencana, dan jauh dari akses peradaban.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota diwakili Asisten II, Fitma

Indrayani mengatakan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sekadar urusan pendidikan formal sekolah, tetapi juga meliputi pendidikan keluarga, dan lain-lain, sinifnya pun kompleks, tidak berdiri sendiri, karenanya ia juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

"Setidaknya itulah yang melandasi kenapa di Kabupaten Limapuluh Kota memprioritaskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan SDM," kata dia.



Wali Kota Solok, Zul Elfan Umar saat menghadiri Silaturahmi Dharmauyukti Karini Provinsi Sumatera Barat, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok

Wako Solok Hadiri Silaturahmi Dharmauyukti Karini Sumbar

Solok, Khazanah - Wali Kota Solok, Zul Elfan Umar menghadiri kegiatan Silaturahmi Dharmauyukti Karini Provinsi Sumatera Barat, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Sabtu (18/3/23).

Kegiatan itu dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H dengan mengangkat tema Mari kita kembangkan Akidah, mantapkan ibadah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa di Bulan Suci Ramadhan.

Hadir langsung, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, DR. H. Amril, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumatera Barat selaku pelindung Dharmauyukti Karini cabang se-Sumatera Barat, serta seluruh pengurus Dharmauyukti Karini se-Sumatera Barat.

Wako Solok mengucapkan terimakasih karena telah memilih Kota Solok dalam pertemuan Dharmauyukti Karini se-Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini sangat tinggi nilainya, karena silaturahmi sangat baik dan banyak manfaatnya.

Apalagi, kita semua akan memasuki Bulan Suci Ramadhan 1444 H. Untuk itu, Selamat bersilaturahmi, selamat menjalankan ibadah puasa. "Semoga Ramadhan tahun ini menjadi Ramadhan terbaik dan terindah dalam hidup kita," sebut wako.

Ketua Pengadilan Negeri Solok, Raden Danang Noor Kusumo, SH mengatakan, Dharmauyukti Karini merupakan Organisasi Wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002 melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/07/SK/II/2002.

Organisasi Dharmauyukti Karini beranggotakan Para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati dan Istri Para Karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.

Adapun Visi Dharmauyukti Karini yakni Terwujudnya satu organisasi yang dapat mempersatukan Ibu-Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di Indonesia. Misi Dharmauyukti Karini adalah Menjalin ketepatan dalam langkah dan gerak kegiatan, Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan mempercepat rasa persatuan dan kesatuan serta Meningkatkan kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota.

Kegiatan itu juga dilengkapi dengan stand-stand dari UIMKM Kota Solok. Berbagai produk dari pelaku usaha Kota Solok tampak dipromosikan dalam kegiatan itu. ■ rjral islmy

Dia mengatakan model yang diterapkan dengan membangun Kampung Quran juga bisa memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi dengan bertolak dari platform bahwa Kampung Quran dengan Satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan merupakan bentuk literasi pembangunan Islam yang berkeadilan. ■ lili yuniati